



AKSES DAN PARTISIPASI PENDIDIKAN TINGGI YANG LEBIH INKLUSIF

Elga Andina*

Abstrak

Partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, dengan angka partisipasi kasar perguruan tinggi hanya 32%, jauh tertinggal dari jenjang pendidikan dasar dan menengah. Biaya pendidikan yang tinggi, keterbatasan daya tampung PTN, serta ketimpangan akses geografis dan kualitas pendidikan menengah menjadi faktor utama yang menghambat banyak siswa untuk melanjutkan studi. Hambatan psikologis, seperti rasa tidak percaya diri dan stigma sosial, semakin mempersempit peluang bagi kelompok rentan, termasuk siswa dari keluarga ekonomi lemah, daerah terpencil, serta kelompok minoritas. Artikel ini menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia serta merumuskan strategi untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Meskipun kebijakan afirmasi dan program beasiswa telah diterapkan, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, termasuk pemerataan infrastruktur pendidikan, perbaikan sistem seleksi PTN, serta peningkatan kualitas dan daya saing PTS agar menjadi alternatif. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI perlu mendorong kebijakan pemerintah yang lebih inklusif dan efektif guna memastikan akses pendidikan tinggi yang lebih merata, baik melalui perluasan program beasiswa, peningkatan standar mutu PTS, maupun penguatan dukungan sosial dan psikologis bagi calon mahasiswa dari berbagai latar belakang.

Pendahuluan

Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun ini diwarnai oleh kasus ratusan siswa di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan yang gagal mendaftar akibat kelalaian sekolah dalam menginput data ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) (BeritaSatu, 2025; KompasTV, 2025). SNBP sendiri merupakan salah satu dari lima jalur masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN), selain Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), Jalur Mandiri, Jalur Beasiswa Prestasi, dan Jalur Beasiswa Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi). Beragam jalur masuk yang tersedia seharusnya dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, pada kenyataannya tidak semua siswa memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk memanfaatkannya secara optimal.

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: elga.andina@dpr.go.id

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa hanya 6,68% penduduk Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi (Kusnandar, 2024), sementara angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi (PT) hanya 32—terendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya (Badan Pusat Statistik [BPS], 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa akses ke pendidikan tinggi masih sangat terbatas dan perlu diperluas agar lebih banyak siswa memiliki kesempatan yang setara untuk melanjutkan studi serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Artikel ini akan membahas faktor-faktor penghambat yang memengaruhi akses dan partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperluas akses tersebut.

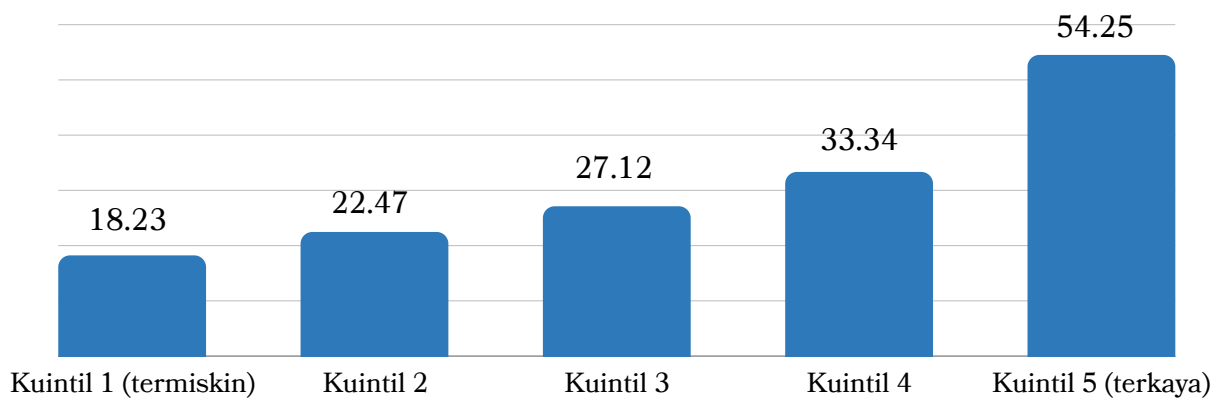
Partisipasi Pendidikan Tinggi

Partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih jauh dari optimal. Pada 2023, sekitar 3,57 juta lulusan SMA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi (PT), sementara 2,29 juta lulusan SMK tergolong *not in education, employment, or training* (NEET) (Mashabi & Prastiwi, 2024). Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2024, angka partisipasi kasar (APK) sekolah dasar (SD) mencapai 104,82, menurun di jenjang SMP (92,21), semakin rendah di jenjang SMA (87,29), dan turun signifikan pada jenjang pendidikan tinggi (32,00) (BPS, 2024, p. 62).

Padahal, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak di dunia. Per 15 Februari 2025, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) mencatat terdapat 127 PTN, 240 PT yang dikelola kementerian lain, 4.439 PTS, dan 1.567 perguruan tinggi asing yang beroperasi di Indonesia (PDDikti, t.t.). Selain itu, Kementerian Agama mengelola 85 pendidikan tinggi keagamaan negeri dan 1.287 pendidikan tinggi keagamaan swasta (EMIS, t.t.). Namun, tingginya jumlah perguruan tinggi belum sejalan dengan meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi.

Dinamika Partisipasi Pendidikan Tinggi

Partisipasi pendidikan tinggi masih menghadapi berbagai kendala. *Pertama*, biaya kuliah, transportasi, dan akomodasi menjadi hambatan utama bagi siswa dari keluarga ekonomi lemah. Bantuan pembiayaan belum mencakup semua yang membutuhkan, sehingga akses pendidikan tinggi cenderung lebih tinggi bagi siswa dari keluarga berpenghasilan tinggi (APK 54,25) dibandingkan mereka yang kurang mampu (BPS, 2024, p. 62). Siswa dengan keterbatasan ekonomi lebih mengandalkan PTN yang disubsidi pemerintah, sementara PTS sulit dijangkau karena biaya yang lebih tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024, p. 62.

Gambar 1. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi Menurut Kuintil Pengeluaran, 2024

Kedua, faktor geografis turut memengaruhi akses pendidikan tinggi. Siswa di daerah terpencil mengalami keterbatasan transportasi, infrastruktur, dan akses internet yang menyulitkan mereka dalam proses pendaftaran dan persiapan kuliah. Selain itu, kualitas pendidikan menengah menjadi penentu kesiapan siswa menghadapi seleksi PT. Sekolah di kota besar dengan fasilitas dan tenaga pengajar yang lebih baik memberikan keuntungan lebih besar, sementara sekolah di daerah dengan sarana terbatas menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan tinggi (tvOneNews, 2025).

Ketiga, sistem seleksi PTN yang ketat dan kompleks menjadi tantangan tersendiri. Masalah teknis, seperti kegagalan sistem PDSS dalam SNBP 2025, menyebabkan banyak siswa kehilangan kesempatan masuk PTN (tvOneNews, 2025). PTN tetap menjadi pilihan utama karena biaya kuliah yang lebih terjangkau berkat subsidi pemerintah serta kualitas akademik yang lebih terjamin dibandingkan PTS.

Keempat, faktor sosial dan psikologis juga memengaruhi partisipasi pendidikan tinggi. Siswa dari kelompok minoritas, masyarakat adat, atau daerah tertinggal sering merasa kurang mendapat dukungan sosial dan akademik (Muharani et al., 2024). Diskriminasi struktural, stigma sosial, minimnya *role model*, serta keterbatasan bimbingan akademik membuat mereka merasa peluangnya lebih kecil.

Kelima, tekanan sosial turut mempersempit akses ke pendidikan tinggi. Perempuan dan anak-anak dari keluarga ekonomi lemah sering kali dihadapkan pada ekspektasi untuk segera bekerja guna membantu ekonomi keluarga, sehingga kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan semakin terbatas.

Strategi Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi seharusnya menjadi kesempatan bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Untuk mengatasi hambatan pembiayaan, kebijakan afirmasi perlu diperkuat dan lebih tepat sasaran. Perluasan program beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bidikmisi harus mencakup tidak hanya biaya kuliah, tetapi juga kebutuhan hidup, akomodasi, dan transportasi bagi mahasiswa kurang mampu. Selain itu,

pemerataan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah terpencil, harus menjadi prioritas agar semua siswa memiliki akses setara terhadap sumber belajar dan teknologi.

Peningkatan kualitas pendidikan menengah menjadi fondasi utama bagi kesetaraan akses ke perguruan tinggi. Upaya konkret seperti pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi pengajaran, penerapan kurikulum berbasis kompetensi, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu siswa lebih siap menghadapi seleksi PTN. Program pemberdayaan daerah, termasuk peningkatan pendanaan dan pengembangan kapasitas tenaga pendidik di wilayah kurang berkembang, juga penting untuk memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan.

Selain itu, reformasi sistem seleksi PTN perlu dilakukan agar lebih inklusif dan transparan. Penyederhanaan prosedur pendaftaran, penyebaran informasi yang lebih baik, serta perbaikan sistem teknis akan membantu calon mahasiswa memahami dan mempersiapkan diri lebih baik. Peningkatan mutu PTS juga perlu didorong agar menjadi alternatif setara dengan PTN, sehingga siswa yang tidak diterima di PTN tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas.

Tak kalah penting adalah mengatasi hambatan psikologis yang membatasi akses pendidikan tinggi, terutama bagi kelompok minoritas, masyarakat adat, dan daerah tertinggal. Program bimbingan akademik dan pendampingan karier yang melibatkan perguruan tinggi, sekolah, dan organisasi sosial dapat memberikan dukungan yang lebih kuat bagi siswa. Selain itu, beasiswa juga harus mencakup pelatihan keterampilan dan pengembangan diri agar siswa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan tinggi. Kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan dan kelompok rentan perlu diperluas guna mengubah norma sosial yang menghambat mereka.

Penutup

Partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk biaya pendidikan yang tinggi, keterbatasan daya tampung PTN, ketimpangan geografis, serta hambatan sosial dan psikologis. Kebijakan afirmasi seperti beasiswa yang mencakup biaya kuliah, akomodasi, dan transportasi perlu diperluas. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan menengah harus menjadi prioritas melalui pelatihan guru, penerapan kurikulum berbasis kompetensi, dan pemanfaatan teknologi, sehingga kesiapan siswa dalam menghadapi seleksi PTN dan PTS lebih merata.

Komisi X DPR RI perlu mendorong kebijakan yang memastikan pemerataan akses pendidikan tinggi, termasuk memperkuat pendanaan beasiswa bagi kelompok rentan, meningkatkan mutu PTS agar menjadi alternatif yang setara dengan PTN, serta mereformasi sistem seleksi PTN agar lebih inklusif. Selain itu, program bimbingan akademik dan kampanye kesadaran akan pendidikan perlu diperkuat untuk mengatasi hambatan psikologis, guna memastikan pendidikan tinggi dapat diakses secara lebih merata dan berkelanjutan.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2024, November). *Statistik pendidikan 2024*. BPS.
- BeritaSatu. (2025, Februari 8). *Dialog: Siswa terancam gagal ikut SNBP, siapa yang harus disalahkan?* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qAzZlc9hFow&tab_channel=BeritaSatu
- Education Management Information System [EMIS]. (t.t.). *Data pendidikan tinggi. EMIS*. Diakses dari <https://emis.kemenag.go.id/dikti/statistik?secure=yLVXebSbuA3J7GB3iW55hA%3D%3D>, pada 25 Februari 2025.
- KompasTV. (2025, Februari 9). *Sekolah lalai memproses finalisasi PDSS untuk SNBP 2025, siswa terbengkalai* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=59CeCewg7q4>
- Kusnandar, V. B. (2024, Mei 30). Tak sampai 7% penduduk Indonesia yang lulus perguruan tinggi pada 2023. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/7babc92c2c35133/tak-sampai-7-penduduk-indonesia-yang-lulus-perguruan-tinggi-pada-2023>
- Mashabi, S., & Prastiwi, M. (2024, Mei 27). Data BPS: 3,5 juta lulusan SMA tidak lanjut kuliah atau bekerja. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/edu/read/2024/05/27/072700371/data-bps-3-5-juta-lulusan-sma-tidak-lanjut-kuliah-atau-bekerja>
- Muharani, R., Kamal, M., Ilmi, D., & Afrinaldi. (2024). Pengaruh keadaan ekonomi dan latar belakang pendidikan orang tua terhadap motivasi melanjutkan studi ke perguruan tinggi siswa di SMA N 1 Rao Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1659–1669. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7969>
- Pangkalan Data Pendidikan Tinggi [PDDikti]. (t.t.). *Perbandingan jumlah perguruan tinggi berdasarkan kelompok pembina*. PDDikti. Diakses dari <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/statistik?tab=pt> pada 15 Februari 2025.
- tvOneNews. (2025, Februari 9). *Silang pendapat DPR RI dengan pengamat pendidikan soal SNBP untuk siswa* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=f9Urz0WgcG4>